

ABSTRAK

Tanto Yunaedi, 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Aplikasi Pinjaman *Online* Ilegal. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Ibu Dr. Nyimas Enny F.W, S.H., M.H dan Ibu Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Data, Aplikasi, Pinjaman *Online*

Tindak pidana penyebaran data pribadi, terutama oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal, menjadi masalah serius di masyarakat, menyebabkan kerugian finansial dan mengakibatkan banyak korban. Sanksi yang ada dalam Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mencakup pidana penjara hingga 4 tahun dan denda maksimal Rp 4 miliar, dimana aturan ini dianggap tidak memadai untuk menangani kasus ini. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan penegakan studi kasus sehingga Sumber data berupa Bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dengan analisis data berupa analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal adalah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 26 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Informasi dan Pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal adalah Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, keterbatasan akses ke informasi, mudah tertarik kepada hal hal yang kemudahan, kurangnya kepercayaan terhadap penegak hukum dan lembaga resmi, kultur/budaya, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, kurangnya sarana untuk melaporkan pelanggaran, penegakan hukum yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, kurangnya penyuluhan hukum kepada masyarakat dan kemudahan teknologi

ABSTRACT

Tanto Yunaedi, 2021. Legal Protection for Victims of Personal Data Distribution by Illegal Online Loan Applications. Thesis. Faculty of Law, Batanghari University, Jambi. Mrs. Dr. Nyimas Enny F.W, S.H., M.H and Mrs. Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H.

Keywords: Legal Protection, Victims, Data, Applications, Online Loans

The crime of spreading personal data, especially by illegal online loan applications, is a serious problem in society, causing financial losses and resulting in many victims. The sanctions contained in Article 67 Paragraph (2) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, which include imprisonment of up to 4 years and a maximum fine of IDR 4 billion, where this regulation is considered inadequate to handle this case. The research methodology used is a normative research type using a legislative approach and case study enforcement so that the data sources are in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique is a document study with data analysis in the form of qualitative analysis. The results of this study are that legal protection for victims of the spread of personal data by illegal online loan applications has been regulated in various laws and regulations such as Article 29 Paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Article 1 paragraph (22) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, Article 26 Paragraphs (1) and (2) and Article 45A of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Article 369 of the Criminal Code, Article 8 and Article 9 of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, Article 67 Paragraph (2) of Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data and Article 47 of the Financial Services Authority Regulation Number 77 /Pojk.01/2016 concerning Information-Based Money Lending Services and Article 55 Financial Services Authority Regulation Number 6 /Pojk.07/2022 Concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector and Obstacles in legal protection for victims of the spread of personal data by illegal online loan applications are Lack of legal awareness from the public, lack of public knowledge about the law, limited access to information, easily attracted to things that are easy, lack of trust in law enforcement and official institutions, culture, distrust of the legal system, lack of means to report violations, law enforcement that is not in accordance with the legislation, lack of legal counseling to the public and ease of technology